

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 45 Tahun 2012 Tentang Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012 yang Telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No. 163 Tahun 2012 Tentang batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 122 Tahun 2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak*

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Penjualan atas Barang Mewah.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Eksposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan.*

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Eksposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2: Laporan Arus Kas.*

Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Kerlinger, Fred.N. 1986. *Foundations of Behavioral Research.* Penerjemah Simatupang, Landung. 2004. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Poerwandari, E.K. 2005. *Pendekatan kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia.* Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2012. *Perpajakan: Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta : Salemba Empat

Suandy, Erly. 2008. *Perpajakan: Perencanaan Pajak.* Jakarta : Salemba Empat

Yin, Robert, K. 1981. *Case Study Research Design and Methods.* Penerjemah Mudzakir. 2002. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Zain, Mohammad. 2007. *Perpajakan: Manajemen Perpajakan.* Jakarta : Salemba Empat